

HUBUNGAN EKONOMI INDONESIA–AMERIKA SERIKAT DALAM BIDANG IMPOR HASIL PERTANIAN PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

SITI RIFATUL AMALIA
Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Suarabaya
Email: rifa.amalia75@gmail.com

Corry Liana
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang seharusnya mampu memenuhi kebutuhan barang konsumsi bagi penduduknya melalui produksi dari dalam negeri sendiri. Pada masa Demokrasi Terpimpin, yang merupakan masa dimana dunia sedang mengalami Perang Dingin, Indonesia menjalin hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat yang merupakan negara Blok Barat/ negara yang sedang menjadi peran utama dalam perang dingin. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang impor hasil pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin? Dan Bagaimana implementasi impor hasil pertanian antara Indonesia dan Amerika Serikat?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Langkah pertama adalah mengumpulkan sumber data yang sejamin baik sumber primer maupun sekunder. Sumber primer yang telah dikumpulkan penulis yaitu berupa surat kabar, majalah, arsip BPS, arsip dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan Jurnal dari web resmi Amerika Serikat, dan sumber sekunder berupa buku yang berkaitan. Selanjutnya dilakukan kritik dengan cara membaca semua sumber primer maupun sumber sekunder, dan memverifikasinya. Selanjutnya tahap interpretasi dilakukan dengan menghubungkan antar fakta lalu dapat disusun historiografi dengan judul Hubungan Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat dalam Bidang Impor Hasil Pertanian Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

Ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin mengalami ketidakstabilan yang parah, mulai dari jumlah uang yang beredar naik dengan tidak seimbang dengan jumlah produksi barang, sehingga juga berpengaruh pada kenaikan harga yang drastis. Kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin berpacu berdasarkan UUD 1945, sedangkan kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat dibuat berkaitan dengan kondisi dunia yang sedang mengalami perang dingin. Impor hasil pertanian Indonesia dan Amerika yang berjalan sejak masa presiden Eisenhower, dan dilanjutkan pada masa presiden penggantinya, Kennedy, berpengaruh pada penambahan jumlah barang konsumsi yang beredar di masyarakat Indonesia

Kata kunci : *Impor, Demokrasi Terpimpin*

ABSTRACT

Indonesia is a country known as an agrarian country that should be able to meet the needs of consumer goods for the population through production from within the country itself. In the period of Guided Democracy, which was a period in which the world was experiencing World War, Indonesia established an economic relationship with the United States which was a Western Bloc / country which was playing a major role in the Cold War. The problems in this research are: What is the relationship between Indonesia and the United States in the field of agricultural imports during Guided Democracy? And how is the implementation of agricultural imports between Indonesia and United States?

The method used in this research is the method of historical research. The first step is to collect data sources that are both primary and secondary sources. Primary sources that have been collected authors are in the form of newspapers, magazines, archives of BPS, archives from the Ministry of Foreign Affairs of Indonesia, and Journal of the official web of the United States, and secondary sources of related books. Further criticism is made by reading all primary sources and secondary sources, and verifying them. Furthermore, the stage of

interpretation is done by connecting between facts and then can be arranged historiografi with title Economic Relations Indonesia-United States In The Field Of Imports Of Agricultural Products In A Guided Democracy Period.

The Indonesian economy at the time of Guided Democracy experienced severe instability, from the amount of money in circulation rising unbalanced by the amount of goods produced, thus also affecting drastic price increases. Indonesia's foreign economic policy during Guided Democracy raced according to the 1945 Constitution, while US foreign economic policy was made in relation to the conditions of the cold war world. Imports of Indonesian and American agricultural products that have been running since the Eisenhower presidency, and continued during the time of its successor president, Kennedy, have an effect on the increasing number of consumer goods circulating in Indonesian society

Keywords: Imports, Guided Democracy

PENDAHULUAN

Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dapat dikatakan mulai erat sejak 28 Desember 1949, ketika Amerika Serikat membuka Kedutaan Besar Amerika di Jakarta dan menunjuk Duta Besar AS pertama untuk Indonesia, Horace Merle Cochran. Pada 20 Februari 1950, Pemerintah Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar Republik Indonesia pertama untuk Amerika. Dibukanya Kedutaan Besar di kedua negara merupakan langkah tertinggi dalam hubungan diplomatik antar negara, karena penempatan Duta Besar hanya dilakukan di negara yang mempunyai hubungan erat dan memiliki banyak hubungan timbal balik. Landasan kuat Indonesia dan Amerika Serikat dalam menjalin hubungan timbal balik atau melakukan kerjasama berlandaskan pada adanya nilai-nilai dasar yang dihormati bersama (*shared values*), yaitu demokrasi, *good governance*, penghormatan hak asasi manusia, dan masyarakat yang plural dan toleran. Berdasarkan landasan tersebut, yang diharapkan Indonesia adalah tercapainya suatu hubungan yang lebih luas dan mendalam dengan pemerintah Amerika Serikat di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kedua belah pihak.¹

Masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa yang sulit bagi Indonesia dimana terjadi ketidak stabilan baik di bidang politik maupun ekonomi. Masa-masa Demokrasi Terpimpin terjadi banyak goncangan, yaitu adanya masalah usaha pembebasan Irian Barat, masalah dengan Malaysia, serta keadaan ekonomi yang sangat kritis, bahkan disebut masa Demokrasi Terpimpin merupakan masa dimana ekonomi mengalami *hyper inflasi* (sekitar 100% per tahun mulai akhir tahun 1961 sampai tahun

1964).² Pada masa Demokrasi Terpimpin pemerintah cenderung lebih fokus pada bidang politik karena memang pada masa tersebut keadaannya sangat genting sehingga masalah ekonomi walaupun berusaha untuk ditangani namun dalam penanganannya kurang fokus.³

Angka pendapatan nasional antara tahun 1953-1959 naik hanya 20%, dimana jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77, 2 juta jiwa, pada 1955 berjumlah 85, 4 juta jiwa, dan menurut sensus pada tahun 1961 adalah 97 juta jiwa.⁴ Dalam tahun 1960-1968, sebelum Repelita dimulai produksi beras sebagai bahan makanan utama hanya naik 1,3 per tahun padahal penduduk naik lebih dari 2% per tahun.⁵ Memang pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat, dari sebelumnya yaitu pada masa-masa terakhir jaman penjajahan penduduk bertambah 1, 5% setiap tahun dan setelah kemerdekaan pertumbuhan penduduk menjadi lebih cepat. Melihat fakta tersebut Indonesia melakukan upaya untuk mencari bantuan dari negara lain karena jumlah penduduk yang meningkat tajam tidak dapat dicukupi dengan hasil pangan dari negara sendiri walaupun Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Indonesia merupakan negara agraris, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian.⁶ Namun di balik kenyataan Indonesia merupakan negara agraris, Indonesia masih melakukan impor hasil pertanian dari negara lain pada masa Demokrasi terpimpin, misalnya pengimporan beras dari Amerika Serikat masa orde

² M.C. Ricklefs. 2010. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, hlm. 562

³ Pemerintah sibuk berusaha mempersiapkan kekuatan militer untuk merebut Irian Barat yang masih dikuasai oleh kolonialis Belanda, dilanjutkan kemudian dengan kegiatan politik untuk mengganyang proyek nekolim Inggris untuk pembentukan Kerajaan Kesultanan Malaysia. Lihat R.Z. Leirissa,dkk. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta : Ombak, hlm.xxiii

⁴ Op.cit., hlm.494

⁵ Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES, hlm. 212

⁶ *Ibid.*, hlm. 12

¹https://www.academia.edu/3407071/Dampak_Hubungan_Indonesia_Dan_Amerika_Serikat_terhadap_Stabilitas_Keamanan_di_Indonesia.pdf, diakses tanggal 30 Januari 2015

lama. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kurangnya produksi bahan konsumsi dari dalam negeri sedangkan jumlah penduduk terus meningkat.

Di sisi lain sektor pertanian Amerika Serikat merupakan sektor yang dibanggakan karena kehebatannya. Ada beberapa fakta yang luar biasa mengenai pertanian Amerika Serikat. Pada prinsipnya fakta-fakta itu berhubungan dengan tingginya produktifitas sektor pertanian Amerika Serikat untuk mencapai hasil dengan keuntungan tinggi. Produk pertanian merupakan barang ekspor penting bagi Amerika Serikat.⁷ Selain kenyataan tersebut, Amerika Serikat juga mempunyai komitmen terhadap perdagangan bebas mempunyai akar ekonomi dan politik, Amerika Serikat terbuka melihat bahwa perdagangan bebas tidak hanya berguna untuk memajukan perekonomian negara Amerika sendiri tapi juga sebagai alat untuk membangun hubungan damai antar negara, komitmen tersebut ada setelah datangnya Depresi Hebat dan terjadinya PD II. Sejak kejadian tersebut Amerika mulai menghilangkan batas perdagangan dan mengoordinasi sistem perekonomian dunia.⁸ Kehebatan sektor pertanian dan sikap terbuka Amerika Serikat terhadap perdagangan bebas membuatnya menjadi negara yang cocok bagi Indonesia untuk mendapatkan atau melakukan impor hasil pertanian/perkebunan dari negara tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan faktor hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang impor hasil pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin dapat terjadi, serta menjelaskan kronologi impor tersebut dan implementasinya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang impor hasil pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin?, 2) Bagaimana implementasi kegiatan impor hasil pertanian antara Indonesia–Amerika Serikat?

METODE

Untuk mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan metode penelitian sejarah.⁹ Peneliti menggunakan metode historis dalam penelitian ini sebagaimana yang disarankan oleh *Louis Gottschalk*, yakni: *heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi*.¹⁰

Tahap pertama yaitu heuristik. Heuristik adalah metode atau tahapan dalam penulisan sejarah dimana peneliti mengumpulkan sebanyak-banyaknya sumber yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik itu sumber primer maupun sekunder. Tahap heuristik sangatlah penting, karena pada tahap ini akan menentukan keabsahan dan kevalidan dari hasil tulisan nantinya. Penulis mengumpulkan sumber yang terkait dengan hubungan internasional antara Indonesia dengan Amerika Serikat khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin yaitu hubungan ekonomi keduanya pada tahun 1959-1965. Sumber yang dikumpulkan oleh penulis berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan penulis yaitu berupa koran–koran dan majalah yang diterbitkan pada masa yang sejaman dengan masa Demokrasi Terpimpin serta arsip perjanjian komoditas perdagangan dalam bidang pertanian dari Kementrian Luar Negeri RI, laporan dan data yang berkaitan dengan kebijakan luar Negeri Amerika Serikat dari web resmi history office Amerika Serikat, lembar Negara RI, dan data dari BPS mengenai ekspor impor yang telah dilakukan antara RI-AS.

Adapun sumber primer berupa majalah, arsip, koran yang sudah diperoleh misalnya majalah dari *Star Weekly* dan *Sketmasa* periode 1959-1965, koran *Duta Masyarakat* yang diterbitkan pada tanggal 7 November 1961 dengan judul – *Barang – barang Surplus AS untuk Indonesia*, arsip dari database perjanjian internasional Kementrian Luar Negeri yang berjudul –*Agricultural Commodities Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Under Title-I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 as Amended* yang ditandatangani di Jakarta pada 5 November 1960, laporan dan data dari web resmi History Office Amerika Serikat bagian kebijakan luar negeri khususnya kebijakan ekonomi masa Dwight David Eisenhower dan John Fitzgerald Kennedy. Selain itu penulis juga mencari sumber dari arsip nasional atau BPS tentang data ekspor impor Indonesia–Amerika Serikat pada masa Demokrasi Terpimpin.

Sedangkan sumber berupa buku diantaranya buku Hassan Wirajuda. 2004. *Hubungan Internasional: percikan pemikiran diplomat Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; R.Z Leirissa. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak; *Research di Indonesia 1945-1965 Bidang Pertanian* yang disusun oleh Urusan Research Nasional Republik Indonesia; Yahya A. Muhaimin. 1990. *Bisnis dan Politik Kebijaksanaan Ekonomi Indonesia 1950-1980*. Jakarta: LP3ES, dan masih banyak buku yang lainnya

⁷ Robert L. McCann. *Garis Besar Ekonomi Amerika*. Dinas Penerangan Amerika Serikat

⁸ Kathleen E. Hug. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Departemen Luar Negeri AS Kantor Program Informasi Internasional, hlm. 150

¹⁰ Aminuddin Kasdi. 2005. *Memahami Sejarah*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 10 -11

¹⁰ Louis Gottschalk. 1986. *Mengerti Sejarah: Edisi Terjemahan*. Jakarta: UI Press, hlm. 20

yang akan penulis cantumkan di berbagai footnote dan di halaman daftar pustaka.

Tahap kedua yaitu kritik sumber (pengujian), setelah sumber-sumber diperoleh dilakukan kritik (pengujian) terhadap sumber terdiri dari kritik ekstern pengujian terhadap otentikitas, asli, turunan, palsu, serta relevan tidaknya suatu sumber. Kritik intern yaitu pengujian terhadap isi atau kandungan sumber. Tujuan kritik untuk menyeleksi data menjadi fakta.¹¹

Pada tahap kritik sumber, penulis melakukan pengujian untuk mengetahui validitas sumber-sumber yang telah diperoleh. Kritik merupakan tahap pengujian terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan, dengan membandingkan untuk mengetahui kebenaran isi dari berbagai sumber. Tahap ini bertujuan untuk menyeleksi data menjadi fakta. Sumber sekunder menjadi bahan pendukung sumber primer untuk mengetahui jika terdapat data yang berbeda antara dua jenis sumber tersebut. Yang akan diuji di sini yaitu sumber-sumber yang di peroleh penulis berupa koran-koran, majalah, laporan, dan arsip yang sejaman dan buku-buku yang berkaitan dengan hubungan Internasional Indonesia dan Amerika Serikat khususnya pada masa Demokrasi Terpimpin.

Tahap ketiga yaitu interpretasi atau penafsiran. Setelah hasil kritik terhadap sumber-sumber yang telah ada diperoleh maka selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran terhadap sumber-sumber tersebut. Pada tahap ini penulis akan menghaubungkan berbagai fakta yang telah dikumpulkan kemudian baru menafsirkannya. Penulis akan mencari keterhubungan dari beberapa sumber primer maupun sekunder yang dikumpulkan, bagaimana hubungan antar berbagai fakta tersebut, apakah saling terhubung ada perbedaan atau tidak, kemudian menafsirkannya. Penulis dalam tahap ini berusaha untuk membentuk jalinan makna fakta-fakta yang bersesuaian satu sama lain, hingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Langkah ini merupakan tahap penentuan makna dari hubungan fakta yang satu dengan fakta yang lain, sehingga ada rangkaian cerita yang dapat dipahami.

Tahap keempat yaitu historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Historiografi merupakan tindakan merekonstruksi masa lampau berdasarkan fakta yang telah diinterpretasikan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar. Dapat dikatakan tahap ini merupakan rangkaian fakta yang telah di tafsirkan secara tertulis sebagai kisah atau cerita sejarah. Jadi penulis memaparkan semua isi yang di dapat setelah melakukan tiga metode di atas tadi terlebih dahulu, yang akhirnya dapat wujudkan dalam karya ilmiah yang berjudul -Hubungan Ekonomi Indonesia-Amerika Serikat Dalam Bidang Impor Hasil Pertanian Pada Masa Demokrasi Terpimpin.

¹¹ Opcit., hal 10

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Indonesia Impor Hasil Pertanian dari Amerika Serikat Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi banyak masalah ekonomi yang merupakan warisan dari masa Demokrasi Liberal yang belum teratasi. Meskipun dari sudut pandang politik Soekarno berhasil menjaga Indonesia tetap bersatu, -Demokrasi Terpimpin membawa Indonesia pada salah satu krisis Ekonomi paling dramatis dalam sejarahnya. Dikatakan dramatis karena terjadi berbagai masalah ekonomi yang bertubi-tubi dan parah, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berani yaitu *sanering*, deklarasi ekonomi, dan pencetakan mata uang baru tanpa perhitungan yang matang.¹² Akibatnya Inflasi terjadi sepanjang tahun, bahkan naik terus menerus selama Demokrasi Terpimpin. Akibat Inflasi tersebut sangat berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok di sebagian besar wilayah di Indonesia

Indonesia yang merupakan negara agraris, pada masa Demokrasi Terpimpin sedang mengalami ketidakstabilan ekonominya dalam bidang utamanya. Ekonomi yang tidak stabil pada masa Demokrasi Terpimpin salah satunya disebabkan oleh produktifitas yang lemah sedangkan jumlah penduduk mengalami kenaikan terus menerus yang mengakibatkan tidak seimbang antara jumlah penduduk dan jumlah kebutuhan konsumsi yang tersedia. Tingkat total faktor produktivitas (*total factor productivity*) menurun tajam pada sekitar tahun 1940, dan tidak dapat pulih pada periode 1950-1967 akibat adanya banyak konflik dan kekacauan bidang politik yang terus melanda pada masa tersebut.¹³ Masalah ekonomi terjadi semakin rumit karena satu masalah yang timbul menyebabkan rentetan rentetan masalah yang lain. Adanya tingkat produktifitas yang lemah, ketidakstabilan harga, dan masalah jumlah volume mata uang yang beredar. Berdasarkan berita yang termuat pada koran *Antara* dari sekitar bulan Juni sampai Desember dikatakan bahwa kenaikan harga bahan pokok terjadi di seluruh pelosok kota di Indonesia, bukan hanya pada provinsi tertentu. Kenaikan harga terjadi baik di pulau Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan.

Masalah inflasi di Indonesia juga disebabkan oleh jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan

¹² Luiten Van Zanden dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas, hlm. 306

¹³ *Ibid*, hlm. 290

ketersediaan beras. Penduduk Indonesia pada awal tahun 1960 menjadi 90 juta jiwa, konsumsi beras sebanyak 9 juta ton, produksi awal 1960 8,2 juta ton, impor 0,8 ton dan bertambahnya penduduk pada setiap tahun rata-rata 1,5 juta jiwa. Dapat disimpulkan bahwa kekurangan beras yang harus diimpor 800.000 ton, konsumsi setiap tahun naik 150.000 karena bertambahnya penduduk. Pada akhir tahun 1960 konsumsi naik menjadi 450.000 ton sehingga seluruh jumlah beras yang harus dipenuhi adalah sebanyak 1.250.000 ton.¹⁴ Jumlah produksi yang tidak seimbang dengan jumlah konsumsi merupakan faktor utama kurangnya suplay bahan makanan ke masyarakat sehingga menyebabkan harga naik.

Selain itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pegawai sipil dan militer menerima sebagian gaji mereka dalam bentuk beras.¹⁵ Kebijakan ini dilakukan untuk mempertahankan gaji riil mereka. Melalui kebijakan ini mereka yang dari kalangan sipil dan militer diuntungkan, namun hal tersebut juga menjadi salah satu penyebab kebutuhan beras semakin meningkat karena mereka yang sudah mendapat jatah khusus dari pemerintah.

Pemerintah mempunyai tugas berat dalam menjaga kestabilan moneter pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh inflasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia pada masa tersebut. Kestabilan moneter ini tergantung pada 4 sektor, yaitu anggaran belanja, neraca perdagangan luar negeri (termasuk ekspor dan impor), penanaman modal, dan penabungan. Jadi perdagangan luar negeri termasuk salah satu sektor yang harus dijaga, selain untuk eksistensi Indonesia di mata dunia juga untuk menjaga kestabilan moneter melalui kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan berbagai negara.

Bagi Indonesia titik tolak formalideal rumusan mengenai dasar dan tujuan politik luar negeri Indonesia adalah yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dasarnya yaitu Pancasila, sedangkan prinsip dasar Politik Luar Negeri Indonesia adalah Politik Bebas Aktif yang pertama kali dicetuskan oleh Soetan Sjahrir pada *Asia Conference* di New Delhi pada tahun 1946, dan kemudian oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dikemukakan dalam sidang Komite Nasional

Indonesia Pusat yang diberi judul -Mendayung antara Dua Karangl.¹⁶

Dalam pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia memiliki sifat politik luar negeri yang ditentukan oleh kesejahteraan, dan keadilan di dunia ini. Melihat adanya dua blok besar, yaitu blok kapitalis dan blok komunis, kita bebas menentukan sikap yang pada prinsipnya tidak memihak, karena berdasarkan ideologi Pancasila kita tidak memihak antara kapitalisme maupun komunisme itu, sepanjang mengenai pertentangan internasional terutama di bidang ideologi. Jadi arti kata "*bebas*" adalah tidak memihak dalam pertentangan antara blok Barat maupun blok Timur. Apabila kita mengambil tindakan yang kebetulan sejalan dengan salah satu blok, maka hal tersebut karena sikap yang kita ambil berkaitan dengan kepentingan nasional dalam kurun waktu dan keadaan tertentu yang kebetulan sejalan dengan salah satu blok. Contoh kasusnya adalah Indonesia merupakan negara yang anti komunis, tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin dilakukan pembentukan poros Jakarta Peking dengan alasan Indonesia membutuhkan bantuan militer dan logistik berkaitan dengan konfrontasi Malaysia, dan membutuhkan bantuan modal asing.

Sedangkan makna -*aktif* -dari politik luar negeri Indonesia adalah sesuai dengan tujuan nasional kita yang berpacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dimana kita tidak boleh diam saja, tapi secara aktif memperjuangkan kemerdekaan, agar bebas dari penjajahan dan berperan aktif dalam menjaga keamanan dunia. Jadi dapat dikatakan bahwa politik bebas aktif yang diterapkan Indonesia merupakan politik yang tetap menjunjung tinggi wibawa dan harta martabat bangsa dalam mengambil sikap dan berhubungan dengan negara-negara lain.

Penerapan politik bebas aktif dianggap merupakan kebijakan yang tepat dimana dunia sedang berada dalam dua kekuasaan besar. Dengan politik bebas aktifnya, Indonesia tetap dapat berhubungan dengan kekuatan manapun sesuai dengan kepentingan negara. Politik bebas aktif membuat Indonesia diterima baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet. Kepiawaian Soekarno dalam berdiplomasi juga menjadi salah satu modal utama Indonesia dalam menjalin komunikasi dengan negara yang mempunyai kepentingan dengannya.

Politik luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin di bidang perdagangan dan perkreditan

¹⁴ Antara. *Bagaimana Usaha Kita Menutupi Kekurangan Beras Dalam Rentjana Tiga Tahun Yang Akan Datang*. 26 Desember 1959, hlm. 2 dan 3

¹⁵ *Ibid*, hlm. 31

¹⁶ Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Indonesia. 2005. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1960-1965*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, hlm. 10-11

memiliki kecenderungan untuk menerapkan ajaran *Marxisme* yang bersandar pada prinsip realitas yang ada dalam masyarakat dan aktivitas politiknya disesuaikan dengan realitas yang ditemukan. Di sinilah letak sumber pengertian dan latar belakang tindakan-tindakan pemerintahan Soekarno selama Demokrasi Terpimpin itu mengenai perkreditan luar negeri dilandasi dengan konsep meng-*arrangement* dan *readjustment*¹⁷ dengan negara-negara kreditor yang berlaku secara internasional.

Masih lemahnya ekonomi Indonesia yang disebabkan karena merupakan negara yang belum lama merdeka, membuat Menteri Keuangan, Mr. Sutikno berusaha menggerakkan Indonesia untuk aktif dalam perdagangan internasional baik ekspor maupun impor. Indonesia sebagai negara yang dalam masa pembangunan menyukai kerjasama saling membantu secara gotong-royong, salah satunya dengan ikut terdaftar sebagai negara yang ikut dalam perjanjian SAC (*Surplus Agricultur Commoditie*) yang dibuat oleh Amerika Serikat. Mengenai pinjaman SAC (*Surplus Agricultur Commoditie*), Sekjen Kementerian Luar Negeri, Soewito menyambut dengan baik, sebab hal tersebut akan menimbulkan kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua negara, bukan saja di bidang ekonomi dan perdagangan, tetapi dalam hubungan spirituil akan menjalinkan hubungan yang erat.¹⁸ Hubungan yang terjalin antara Indonesia dan Amerika Serikat ini juga merupakan cerminan dari tindakan penerapan politik bebas aktif yang dilakukan oleh Indonesia, dimana Indonesia memandang Amerika Serikat sebagai negara adidaya yang kebetulan menawarkan programnya dan Indonesia sedang dalam kondisi membutuhkan bantuan.

B. Alasan Amerika Serikat Ekspor Hasil Pertanian ke Indonesia

Amerika Serikat merupakan negara yang kaya sumber daya mineral dan tanah pertanian yang subur, dan diberkahi iklim sedang.¹⁹ Sumber daya mineral yang banyak dimiliki Amerika Serikat yaitu minyak, emas, batu bara, dan endapan uranium. Sedangkan, hasil pertanian Amerika Serikat merupakan salah satu di antara produsen utama. Di antara hasil pertaniannya yang unggul yaitu jagung, gula,

gandum, beras, dan tembakau.²⁰ Adanya keadaan geografis yang mendukung tersebut membuat Amerika menjadi salah satu negara produsen barang-barang mentah dari hasil buminya.

Pertanian memiliki posisi yang penting dalam perekonomian Amerika Serikat dan juga budayanya. Pertanian menjadi suatu yang bernilai sekali di Amerika. Di masa awal bangsa Amerika, petani dianggap memberikan kebijakan ekonomi yang baik, seperti kerja keras, inisiatif, dan kemampuan mencukupi kebutuhan mereka sendiri.²¹ Selain itu, pertanian Amerika Serikat sempat mengalami kelebihan produksi pertanian/surplus pertanian pada tahun 1950an, yang menjadikan ekonomi negara menjadi tidak stabil.

Cara Amerika Serikat untuk mencapai manfaat dan keunggulan dalam bidang ekonomi terlihat pada konsep *Manifest Destiny*. Berlandaskan pada semangat ekspansionisme Amerika tidak pernah berhenti mempertahankan diri secara strategis baik dalam bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Semua ini dapat dilakukan karena Amerika memiliki kekuatan dan senantiasa berpikir jauh ke depan dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan dihadapi.

Tidak lama setelah mengakui kemerdekaan Indonesia, Amerika Serikat mulai memperlebar fokus strateginya. Invasi Korea Utara atas Korea Selatan pada bulan Juni 1950 dan masuknya Republik Rakyat Tiongkok ke dalam perang Korea pada bulan November tahun itu mengakibatkan berakhirnya perhatian berlebihan Amerika Serikat terhadap Eropa dan meningkatkan kekhawatiran-nya tentang ekspansi komunis ke Asia.²² Pada akhirnya Amerika Serikat melakukan berbagai upaya untuk memberikan pengaruh kepada negara-negara yang sudah mulai dimasuki pengaruh komunis yang merupakan musuh ideologi utama bagi Amerika Serikat. Upaya yang dilakukan Amerika Serikat yaitu dengan memberikan bantuan ekonomi maupun militer. Adanya kekhawatiran tentang penyebaran Komunisme Internasional dan pertumbuhan kekuatan Uni Soviet, mendominasi berbagai keputusan kebijakan luar negeri yang diambil selama pemerintahan Eisenhower.

Di akhir Perang Dunia II, ekonomi pertanian Amerika Serikat mengalami kelebihan produksi. Kemajuan teknologi, seperti adanya mesin-mesin yang memakai bahan bakar bensin maupun tenaga

¹⁷ *Arrangement* adalah susunan atau rencana, sedangkan *readjustment* adalah pengaturan kembali

¹⁸ Antara. *Pinjaman SAC ke III Sebesar US\$ 16 Djuta Ditandatangani*. 5 November 1960, hlm. 4

¹⁹ Kathleen E. Hug. 1981. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Departemen Luar Negeri AS Kantor Program Informasi Internasional, hlm. 9

²⁰ Taufiq Adi Susilo. 2009. *Mengenal Amerika Serikat*. Yogyakarta: Garasi, hlm. 87

²¹ *Opcit*, hlm. 117

²² Paul F. Gardner. 1999. *50 Tahun Amerika Serikat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Hlm.195

listrik, dan meluasnya penggunaan pupuk dan penyubur bahan kimia, membuat produksi per hektar menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Pemerintah mencari solusi dengan melakukan kebijakan untuk membantu mengkonsumsi kelebihan hasil panen yang telah menyebabkan penekanan harga dan membebani uang para pembayar pajak, yaitu pada Kongres di tahun 1954, pemerintah Amerika Serikat menciptakan program pangan perdamaian (*Food for Peace*) untuk diekspor ke negara-negara yang memerlukan. *Food for Peace* ini selanjutnya dikenal juga dengan istilah program SAC (*Surplus Agricultur Commodity*) atau PL-480. Pembuat kebijakan beralasan bahwa pengiriman makanan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari negara-negara berkembang. Aktivis kemanusiaan melihatnya sebagai cara Amerika membagi kelebihannya.²³

Dilakukannya revitalisasi program bantuan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan John F Kennedy dan Lyndon B. Johnson, menandakan akan semakin pentingnya bantuan kemanusiaan sebagai bentuk diplomasi, dan memperkuat keyakinan bahwa keamanan Amerika dapat dipengaruhi oleh kemajuan ekonomi dan stabilitas negara lain. Amerika mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan ekonomi kepada negara-negara Eropa setelah Perang Dunia II dengan membantu rekonstruksi mereka dan memperluas bantuan keamanannya untuk negara-negara tersebut sebagai benteng melawan ancaman komunis.

Johnson menekankan program *Food for Peace* sebagai landasan bantuan luar negeri AS, dan dimaksudkan untuk mengejar revisi terhadap program untuk memperkuat orientasi kebijakan luar negerinya. Menurut Johnson Amerika Serikat harus memperpanjang bantuan makanan untuk alasan kemanusiaan, dia juga lebih menyukai perjanjian bantuan makanan pada kemampuan negara penerima untuk melaksanakan reformasi pertanian yang diperlukan. Ketentuan *swadaya*, yang diterapkan pada perjanjian PL-480 dan bantuan AID lainnya, akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi negara penerima dengan memperkuat sektor pertanian mereka. Johnson mengumumkan "perang terhadap kelaparan," yang dirancang untuk mempercepat produksi pertanian, memperbaiki gizi, memberantas penyakit, dan mengekang pertumbuhan populasi. Menurut Johnson, Amerika Serikat tetap

berkuasa dan untuk menunjukkan kepemimpinan dan menciptakan kembali reformasi Great Society dalam negeri dalam skala global.²⁴ Johnson juga memahami bahwa bantuan makanan berfungsi sebagai tujuan diplomatik dan memperkuat posisi strategis AS. Johnson menggunakan perjanjian PL-480 sebagai pengungkit dalam mengamankan dukungan untuk tujuan kebijakan luar negeri A.S.

Secara umum kebijakan luar negeri Pemerintah Amerika Serikat adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan nasional, untuk memperbaiki keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan Amerika Serikat dan rakyatnya. Kepentingan nasional Amerika Serikat yaitu untuk memperluas dunia bebas serta mencegah Uni Soviet memperluas pengaruhnya, menjalankan Containment policy terhadap Uni Soviet di Eropa yang merupakan prioritasnya dan di dunia secara keseluruhan, serta terhadap RRC di Asia dalam rangka Perang Dingin.²⁵ Tujuan luas dari kebijakan ekonomi luar negeri Amerika Serikat memiliki tiga komponen utama, yaitu: Mempromosikan kekuatan ekonomi Amerika Serikat, Mempromosikan kekuatan ekonomi dari seluruh dunia bebas, Untuk membangun dan mempertahankan kohesi di dunia bebas.

Program SAC (*Surplus Agricultur Commodity*) diberikan oleh Amerika Serikat ke berbagai negara yang berkembang, dan salah satunya adalah Indonesia, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang dikhawatirkan terpengaruh oleh pihak komunis. Amerika Serikat memberikan bantuannya dengan tujuan stabilitas ekonominya negaranya juga sekaligus untuk mengawasi negara—negara dari pengaruh komunis

C. Implementasi Impor Hasil Pertanian Indonesia Dari Amerika Serikat Masa Demokrasi Terpimpin

Agricultural Commodities Agreement yang sebenarnya sudah ada sejak masa Demokrasi Liberal yaitu sejak tahun 1956 antara kedua belah pihak disepakai tentang *Surplus Agricultur Commodity* (SAC) dimana Amerika Serikat memberikan bantuan berupa pengiriman kelebihan hasil pertanian ke Indonesia dengan pembayaran menggunakan uang rupiah.

Pada masa Demokrasi Terpimpin ini perjanjian komoditas pertanian pertama kalinya

²³ Kathleen E. Hug. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Departemen Luar Negeri AS Kantor Program Informasi Internasional, hlm. 122

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hasnan Habib. *50 Tahun Hubungan Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat: Tinjauan Politik Keamanan atau militer*. Jurnal Studi Amerika, Vol. V, Agustus-Desember 1999

dilakukan pada 5 November 1960, dengan judul *–Agricultural Commodities Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Under Title-I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 as Amended*". Berdasarkan dokumen Kementerian Luar Negeri isinya adalah kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menjalankan pengembangan perdagangan. Selain itu juga terdapat surat atau tulisan dari sekretaris Jendral Kementerian Luar Negeri, Suwito Kusumowidagdo yang berisi tentang deposito Indonesia berkaitan dengan perjanjian yang telah dilakukan.

Pada pinjaman SAC tanggal 5 November 1960 Amerika Serikat mengirim bantuan senilai dengan 16 juta dollar. Upacara penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di Departemen Luar Negeri Indonesia oleh Sekjen Departemen Luar Negeri Soewito Koesoemowidagdo dan Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones. Dana-dana rupiah ini berasal dari penjualan barang-barang surplus pertanian (SAC) Amerika kepada Indonesia. Dari perjanjian tersebut perinciannya yaitu: 75.000 ton beras, 3, 5 juta pon tembakau dan 24.000 bal kapas. Kapas tersebut akan dipergunakan untuk membiayai sebagian pembelian kapas Indonesia yang diolah di negara-negara lain. Mengenai pembayaran kembali hasil-hasil pertanian ini akan dilakukan dalam mata uang rupiah, berdasarkan kesepakatan tersebut secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena dengan demikian Indonesia dapat menghemat devisa. Selain itu uang rupiah yang diterima oleh Amerika Serikat sebanyak 6 juta dollar sebagai hasil penjualannya di Indonesia akan dihadiahkan kepada pemerintah Indonesia untuk tujuan pembangunan ekonomi. Disamping itu dalam jumlah yang sama akan disediakan sebagai pinjaman ke Indonesia.²⁶

Pada pinjaman SAC tanggal 5 November 1960 Amerika Serikat mengirim bantuan senilai dengan 16 juta dollar. Upacara penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan di Departemen Luar Negeri Indonesia oleh Sekjen Departemen Luar Negeri Soewito Koesoemowidagdo dan Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones. Dana-dana rupiah ini berasal dari penjualan barang-barang surplus pertanian (SAC) Amerika kepada Indonesia. Dari perjanjian tersebut perinciannya yaitu: 75.000 ton beras, 3, 5 juta pon tembakau dan 24.000 bal kapas.

Kapas tersebut akan dipergunakan untuk membiayai sebagian pembelian kapas Indonesia yang diolah di negara-negara lain. Mengenai pembayaran kembali hasil-hasil pertanian ini akan dilakukan dalam mata uang rupiah, berdasarkan kesepakatan tersebut secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena dengan demikian Indonesia dapat menghemat devisa. Selain itu uang rupiah yang diterima oleh Amerika Serikat sebanyak 6 juta dollar sebagai hasil penjualannya di Indonesia akan dihadiahkan kepada pemerintah Indonesia untuk tujuan pembangunan ekonomi. Disamping itu dalam jumlah yang sama akan disediakan sebagai pinjaman ke Indonesia.²⁷

Tindakan yang dilakukan selanjutnya oleh kedua belah pihak adalah penukaran nota dari perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya. Penukaran nota ini dilakukan pada tanggal 23 Desember 1960 yang membahas pula bahwa uang pinjaman dan bantuan dari pembelian hasil pertanian dari Amerika tersebut digunakan untuk pembangunan yang meliputi daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Jadi perjanjian *Surplus Agricultural Commodities* ini bukan hanya sekedar bantuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi Indonesia saja tapi juga dialokasikan untuk program pembangunan semesta Indonesia. Pembangunan Semesta merupakan program pemerintah Indonesia dimana Amerika Serikat turut serta memikul sebagian biayanya berupa pinjaman dan bantuan. Perincian proyek-proyeknya yaitu:

- (1)Proyek Jatiluhur: memberi perairan untuk 240.000 hektare tanah di Jawa Barat, (2)Padi Contra: Menjelang tahun 1962 dibentuk 9 markas besar operasi yang akan memberi bantuan kepada petani-petani dalam penghasilan padi. Tiap padi kontra meliputi 6-10 hektar tanah yang diirigasi. (3)Perbaikan dan perluasan stasiun pembibitan: didirikannya pusat-pusat produksi bibit yang lebih baik untuk masing-masing bidang tanah 1600-3200 hektar tanah yang menghasilkan padi. (4)Penimbunan pupuk: pembuatan penimbunan pupuk dengan kapasitas 8000 ton yang akan ditempatkan pada tiga tempat yang terpisah: Tanjung Priok, Cirebon, dan Semarang yang diselesaikan

²⁶ Antara. *Pinjaman SAC ke III Sebesar US\$ 16 Djuta Ditandatangani*. 5 November 1960, hlm. 4

²⁷ Antara. *Pinjaman SAC ke III Sebesar US\$ 16 Djuta Ditandatangani*. 5 November 1960, hlm. 4

menjelang akhir tahun 1962. (5) Pusat penimbunan padi: bibit padi rakyat dari musim ke musim akan dipindahkan ke 5 buah bangunan penimbunan yang akan selesai menjelang tahun 1961.²⁸

Selain proyek proyek yang sudah tersebut di atas, salah satu realisasi dari proyek yang disepakati akan dibangun berkaitan dengan program SAC adalah dibangunnya pabrik pemintalan kapas di Medan. Sesuai dengan rencana pembangunan pemerintah, oleh Knitting Factory TD Pardede di Km 10 Jalan Medan Binjai sejak Agustus 1960 telah dibangun di atas tanah seluas 20 Ha pabrik pemintalan (spinning) kapas untuk dijadikan benang. Pembangunan pabrik ini menghabiskan biaya 300 juta, namun pada tahap awal pembangunan akhir tahun 1960 tersebut baru dikerjakan dengan biaya 180 juta yang selanjutnya pada bulan Juli tahun 1961 telah dapat dilihat hasil pertamanya. Direktur Knitting Factory Pardede, Pardede menerangkan bahwa pada taraf pertama ditempatkan 15000 spindels dan akan mengolah kapas surplus SAC dari Amerika Serikat, sedangkan pada taraf terakhir dalam tahun 1962 akan dilengkapi dengan 30000 spindels agar pengolahan kapas menjadi benang di pabrik tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan bahan benang bagi pertekstilan di seluruh Sumatera.²⁹

Pada 26 Oktober 1961 diadakan kembali perjanjian antara kedua negara, dengan perjanjian yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Amerika Serikat telah menyetujui dalam prinsip untuk menandatangani suatu persetujuan dalam jangka waktu 3 tahun bagi pengiriman barang surplus hasil-hasil pertanian AS ke Indonesia. Persetujuan bahan makanan untuk perdamaian itu akan lebih luas lagi atas dasar peninjauan tahunan.

Pada Nopember 1961 Menteri pertanian Amerika Serikat telah menawarkan kapas dan beras dalam jumlah yang lebih sedikit daripada jumlah yang diminta oleh Indonesia. Dijelaskannya bahwa surplus-surplus Amerika Serikat mengenai hasil-hasil tersebut menjadi kurang karena adanya banyak permintaan. Persetujuan dalam jangka tiga tahun yang dimaksudkan itu juga meliputi pengiriman tepung gandum dan tembakau hasil AS ke Indonesia.³⁰ Dari keterangan tersebut barang surplus

hasil pertanian Amerika Serikat yang dikirim berarti ada penambahan gandum dari yang sebelumnya tercantum pada lembar perjanjian hanya beras, kapas, dan tembakau. Selain itu, jumlah pengiriman yang lebih sedikit dari jumlah pengiriman yang sebelumnya menandakan program SAC meluas ke berbagai negara, terutama ke negara-negara berkembang.

Berdasarkan sistem bantuannya Amerika Serikat mengirimkan barang-barang surplus hasil pertaniannya ke suatu negara yang membutuhkannya dan harga barang-barang dibayarkan dengan uang setempat (negara penerima). Kemudian Amerika Serikat meminjamkan kembali sebagian besar dari uang pinjaman yang telah dibayarkan kembali kepada negara tersebut dengan syarat bunga rendah dan pembayaran kembali jangka panjang, untuk kepentingan pembiayaan proyek-proyek perkembangan ekonomi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sistem tersebut diberlakukan di semua negara yang menerima bantuan SAC, tapi bantuan pembiayaan proyeknya disesuaikan dengan kebutuhan negara penerima. Di Indonesia pembiayaan proyeknya di alokasikan pada kebijakan pemerintah pada saat itu, yaitu kebijakan pembangunan semesta. Berdasarkan perjanjian SAC Amerika Serikat tidak hanya mengirim bantaun ke Indonesia saja melainkan ke negara-negara lain yang membutuhkan, disinilah peran Amerika Serikat sebagai negara adidaya.

Pada akhir november 1961 sebanyak 150.000 ton beras siap diangkut ke Indonesia. Dengan tindakan ini maka jumlah seluruh beras yang dikirimkan Amerika Serikat kepada Indonesia melalui persetujuan SAC yang ditandatangani sejak 1956, menjadi 600.000 ton. Harga beras dibawah persetujuan ini dan amandemen ini adalah 13, 4 juta dolar AS, termasuk sebagian pembayarann dalam ongkos pengangkutan laut.³¹ Pembayarannya akan dilakukan dalam mata uang rupiah sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Dengan demikian dapat menghemat devisa negara. Dari pembayaran itu Amerika Serikat akan memberikan kepada Indonesia sejumlah uang rupiah senilai 10.050.000 dollar AS untuk maksud pembangunan ekonomi Indonesia. Sejak 1956 keempat persetujuan SAC beserta amandemen-amandemennya itu telah memberikan kepada Indonesia hasil-asil pertanian seharga 186, 8

²⁸ Antara. *Sumbangan AS Dalam Rentjana*.....24 Desember 1960, hlm. 4 dan 5

²⁹ Antara. *Pembangunan Pabrik Pemintalan Kapas Rp. 300 Djuta, Taraf Pertama oleh Kapas Surplus SAC dari Amerika Serikat*. 26 Desember 1960, hlm. 4

³⁰ Duta Masyarakat. *Barang-Barang Surplus AS Untuk Indonesia*. 7 November 1961, hlm. 2

³¹ Duta Masyarakat. *150.000 Ton Beras Siap Untuk Diangkut Ke Indonesia*. 20 Nopember 1961, hlm. 1

juta dollar AS yang dibayar dalam mata uang rupiah.³²

Pada Juni 1963 Indonesia membeli 50.000 ton minyak kedelai dari Amerika Serikat seharga 15.200.000 dollar AS. Dan seperti biasanya pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Deputy 4 Umar Jadi Notowijono yang mewakili pemerintah Indonesia dan Dubes AS untuk Indonesia Howard P. Jones. Dari perjanjian itu ditentukan bahwa 85% dari pembelian tersebut dalam rupiah akan disediakan oleh AS guna pembangunan proyek-proyek yang dilakukan bersama. Sisanya sebesar 15% akan digunakan oleh kedutaan AS untuk keperluan di Indonesia.³³ Dengan adanya penukaran nota tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya penambahan minyak kedelai untuk pertama kali dari bahan-bahan yang sebelumnya sudah sering dikirim. Dengan ditandatanganinya pembelian tersebut maka jumlah seluruh pembelian Indonesia dalam rangka Agricultural Commodities Agreement antara RI dan AS mencapai 142.000.000 termasuk ongkos pengangkutan. Dari penghitungan sejak tahun 1961 yang menyatakan AS akan melakukan perjanjian ini dengan Indonesia selama tiga tahun maka perjanjian ini akan berlangsung sampai 1964. Dan dihitung dari sejak tahun 1956 perjanjian tahun 1963 ini merupakan perjanjian kelima yang seluruhnya meliputi 334.561.058 dollar AS.

Berkaitan dengan perjanjian SAC antara Indonesia dan Amerika Serikat yang salah satu komoditi yang dikirim adalah kapas, maka Indonesia memerlukan produsen untuk mengelola bahan kapas yang merupakan salah satu program dari SAC tersebut. Jepang, Hongkong, Singapura, Cekoslowakia, Pakistan, dan Singapur merupakan negara yang berperan dalam pengolahan kapas kiriman dari Amerika Serikat. Tahun 1961 Indonesia melakukan pembelian terbesar di Jepang, dan selanjutnya di Hongkong serta India. Pengolahan kapas yang melibatkan negara-negara lain ini juga mengharuskan Indonesia mengadakan perjanjian-perjanjian Internasional dengan negara-negara tersebut yang sudah tercantum dalam data Kementerian Luar Negeri. Impor kapas yang dilakukan oleh Indonesia disebabkan oleh Indonesia tidak dapat memproduksi kapas sendiri, karena kapas merupakan tumbuhan yang hanya dapat tumbuh dengan baik di negara yang mempunyai iklim 4

musim. Bukan negara seperti Indonesia yang hujannya tidak menentu, karena kapas ketika sudah berbuah tidak boleh terkena hujan.

Pada tanggal 7 Januari 1964 bertempat di gedung Departemen Luar Negeri diadakan upacara penandatanganan persetujuan pengelolaan kapas PL 480 dengan Pakistan. Penandatanganan dilakukan oleh Sudojo Tjitrokusumo, Pejabat Kepala Direktorat Kerjasama Ekonomi Antar Negara, Departemen Luar Negeri atas nama Pemerintah Republik Indonesia dan oleh Ghulam C. Khan, kuasa Usaha Kedutaan Besar Republik Pakistan di Jakarta. Dalam persetujuan tersebut pihak Pakistan akan mengirimkan ke Indonesia benang tenun seharga US\$ 1.000.000,-. Pembayarannya 65% akan dilakukan dalam bentuk kapas kasar yang diperoleh Indonesia dari Amerika Serikat di bawah United State Public Law 480, sedangkan sisanya 35% akan dibayar dengan dollar secara tunai. Pelaksanaan impor benang tersebut akan dilakukan oleh PN. Budi Bhakti sebagai lanjutan daripada misi perdagangan Indonesia ke Pakistan. Persetujuan itu adalah persetujuan pengolahan kapas yang pertama dilakukan antara Indonesia dengan Pakistan.³⁴

Pada tanggal 2 Januari 1964 dengan menggunakan kapal S,S -Bali kiriman dari Amerika ke Indonesia sampai di Tanjung Priuk. Kapal tersebut memuat 1.200 ton beras dan 570 ton kapas yang diperuntukkan bagi pabrik-pabrik tenun di Indonesia. Muatan itu merupakan sebagian dari barang-barang pertanian Amerika yang disediakan melalui persetujuan berjangka waktu tiga tahun antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dalam rangka program Program Makanan untuk Perdamaian (U.S. Public Law 480). Beras dan kapas yang dikirim dengan kapal S,S -Bali itu dibeli dengan mata uang rupiah, 85% dari uang itu disediakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan Indonesia dan Badan Pembangunan Indonesia yang dijalankan secara koperatif oleh pemerintah Indonesia dan Badan Pembangunan Internasional AS, 15% selebihnya disediakan untuk pembayaran pembelian barang-barang dan layanan-layanan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat.³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demokrasi Terpimpin yang terjadi dalam kurun waktu antara 1959-1965 merupakan bagian

³² Ibid

³³ Bintang Timur. *Indonesia Beli 50.000 Ton Minyak Kedelai Dari AS, Pembayaran akan dilakukan Dalam Mata Uang Rupiah*. 22 Juni 1963, hlm. 2

³⁴ Antara. *Penandatanganan Persetujuan Pengolahan Kapas Dengan Pakistan*. 9 Januari 1964, hlm. 8

³⁵ Antara. *Muatan Beras Dan Kapas "Makan Untuk Perdamaian" Tiba Di Indonesia*. 2 Januari 1964, hlm. 2

dari masa Orde Lama dimana Indonesia dipimpin oleh sang Proklamator, Soekarno. Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa Indonesia belum terlalu lama merdeka, sehingga berbagai permasalahan pun masih sangat banyak menghampiri, terutama masalah politik meliputi perjuangan pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Malaysia, dan G 3/S. Masalah politik tersebut sangat berdampak pada stabilitas ekonomi negara karena pemerintah yang kesulitan menghadapi berbagai masalah yang timbul.

Ketidakstabilan ekonomi yang terjadi meliputi kenaikan volume uang yang tidak sebanding dengan jumlah barang yang beredar karena produktifitas yang lemah, produktifitas yang lemah tersebut akhirnya menyebabkan tidak dapat tercukupinya kebutuhan pangan penduduk karena tingkat kenaikan penduduk yang lebih tinggi dari pada jumlah kebutuhan yang tersedia. Rentetan masalah tadi menyebabkan ketidakstabilan harga bahan pangan maupun sandang yang beredar di masyarakat. Harga dapat naik secara drastis dalam waktu singkat di berbagai daerah, baik itu wilayah Jawa, Sumatra, maupun Kalimantan. Masalah ekonomi yang sulit terselesaikan dan berbarengan tersebut mengakibatkan Indonesia mengalami hyper inflasi pada masa Demokrasi Terpimpin. Pemerintah melakukan usaha untuk mengatasi keterpurukan ekonomi tersebut dengan salah satunya melakukan perjanjian SAC (*Surplus Agricultur Commoditie*) dengan Amerika Serikat.

Indonesia yang merupakan negara Non Blok berusaha tetap menjalin hubungan baik dengan negara adidaya guna memenuhi kebutuhan rakyatnya, dan dalam menjalin hubungan kerjasamanya Indonesia berpacu pada kebijakan politik bebas aktif. Adanya perjanjian tersebut, Indonesia berharap dapat memenuhi kekurangan barang konsumsi dalam tempo yang tidak terlalu lama sekaligus dapat menghemat devisa negara yang jumlahnya tidak sedikit. Devisa tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan lain guna untuk memperlancar pembangunan nasional, karena berdasarkan perjanjian tersebut Indonesia dapat membayar dengan mata uang rupiah sehingga dapat menghemat devisa.

Amerika Serikat melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia tidak semata-mata murni ingin membantu Indonesia. Program SAC merupakan program Amerika Serikat berawal dari masa presiden Eisenhower, dimana Amerika Serikat mengalami kelebihan hasil produksi pertanian yang dapat mempengaruhi kestabilan ekonomi Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat berusaha mengatasi kelebihan hasil pertanian tersebut dengan membuat program -Food for Peace. Program ini tidak hanya dilakukan dengan Indonesia saja, tapi juga dengan negara-negara lain yang berkembang. Selain memakai alasan untuk bantuan bagi negara-negara

berkembang, Amerika Serikat juga melakukan program ini untuk membatasi pengaruh Uni Soviet ke negara-negara tersebut berkaitan dengan perang dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Food for Peace tersebut selanjutnya dikemas dengan perjanjian yang disebut SAC (*Surplus Agricultur Commoditie*).

Dapat dikatakan bahwa kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dilakukan kedua negara dengan maksud untuk kepentingan masing-masing negara, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan bahan konsumsinya dan Amerika Serikat dapat mengurangi jumlah produksi bahan pertaniannya yang berlebihan sehingga dapat menjaga kestabilan ekonomi negaranya. Selain itu, Amerika Serikat juga dapat mengawasi Indonesia dari pengaruh Uni Soviet berkaitan dengan perang dingin.

Sistem dari SAC (*Surplus Agricultur Commoditie*) ini bukan seperti impor yang biasa terjadi karena dapat dikatakan SAC ini merupakan program bantuan atau pinjaman dari Amerika ke Indonesia. Pembayaran Indonesia ke Amerika berupa rupiah akan dikembalikan lagi ke Indonesia dan diwujudkan dengan berbagai program dan proyek untuk memperlancar pembangunan ekonomi di Indonesia, misalnya dengan pembangunan sarana transportasi untuk memperlancar proses distribusi, perancangan peraian untuk sawah, program padi contra, perbaikan dan perluasan stasiun pembibitan, program penimbunan pupuk, dan program pusat penimbunan padi.

Adanya perjanjian SAC ini memiliki sisi baik maupun buruk bagi Indonesia. Sisi baiknya adalah Indonesia dapat menambah barang konsumsi yang dibutuhkan masyarakat serta memperlancar pembangunan ekonomi negara, namun ada sisi buruknya, yaitu hutang negara Indonesia bertambah semakin banyak karena tidak mempunyai Indonesia membayar kredit tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat dikemukakan saran, yaitu seharusnya pemerintah Indonesia dapat belajar dari sejarah masa Demokrasi Terpimpin. Pemerintah seharusnya memperbaiki sistem pertanian di Indonesia agar produk pertanian Indonesia dapat dimaksimalkan sehingga tidak impor dari negara lain. Apalagi pada dasarnya Indonesia merupakan negara agraris yang seharusnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi. Usaha untuk memaksimalkan hasil pertanian di Indonesia dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas teknologi pertanian seperti yang dilakukan oleh Amerika. Pemerintah seharusnya juga lebih

memperdayagunakan hasil dari petani lokal agar petani lebih sejahtera, daripada terus bergantung pada impor yang akan mengakibatkan hutang negara semakin banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Arsip

Arsip dari BPS tahun 1960-1965

B. Lembaran Negara

Lembaran Negara No. 105 Tahun 1965

C. Surat Perjanjian Internasional dari Kementrian Luar Negeri Indonesia

Judul: (1) *Agricultural Commodities Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America Under Title-I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 as Amended.* 5 November 1960
 (2) *Embassy of United States of America.* 23 Desember 1960
 (3) *Agricultural Commodities Agreement between the Government of Indonesia and the Government of the United States of America Under Title-I of the Agricultural Trade Development and Assistance Act of 1954 as Amended.* 26 Oktober 1961

D. Koran

Antara. *Angakatan Laut Siap Dengan Rentjana Kerdjanja Untuk Menghadapi Tahun 1963.* 20 Desember 1962, hlm. 4
 Antara. *Bagaimana Pengaruh Bandjir Uang Kepada Harga Bahan Makanan?.* 26 Juni 1959, hlm. 3 dan 4
 Antara. *Bagaimana Usaha Kita Menutupi Kekurangan Beras Dalam Rentjana Tiga Tahun Yang Akan Datang.* 26 Desember 1959, hlm. 2 dan 3
 Antara. *Bahan-Bahan Konsumsi Untuk Irian Barat Mulai Tiba.* 19 Desember 1962, hlm. 2
 Antara. *Beras Untuk Jogja Tjukup.* 5 Januari 1964, hlm. 8
 Antara. *Fluktuasi harga-harga di Semarang.* 26 Juni 1959
 Antara. *Harga Sandang Pangan Tetap Kuat.* 25 Desember 1959, hlm. 6
 Antara. *Harga Tekstil Diturunkan 15-20 Persen.* 31 Desember 1960, hlm. 6
 Antara. *Impor Beras Devisen Tak Akan Berikan Manfaat Bagi Indonesia.* 26 Juni 1959, hlm. 1
 Antara. *Jumlah Barang Surplus AS Yang dibeli Indonesia.* 7 November 1960, hlm. 2
 Antara. *Kebutuhan Tekstil di Indonesia Terutama Akan Dipenuhi Di Jepang.* 31 Desember 1960, hlm. 1

Antara. *Muatan Beras Dan Kapas "Makan Untuk Perdamaian" Tiba Di Indonesia.* 2 Januari 1964, hlm. 2
 Antara. *Mulai Pertengahan Desember 1960 Harga Tekstil di Nusa Tenggara Barat Turun.* 24 Desember 1960, hlm. 8
 Antara. *Pembangunan Pabrik Pemintalan Kapas Rp. 300 Djuta, Taraf Pertama oleh Kapas Surplus SAC dari Amerika Serikat.* 26 Desember 1960, hlm. 4
 Antara. *Penandatanganan Persetujuan Pengolahan Kapas Dengan Pakistan.* 9 Januari 1964, hlm. 8
 Antara. *Penguasa Pelabuhan Adalah Alat Revolusi.* 3 Januari 1965, hlm.5
 Antara. *Pinjaman SAC ke III Sebesar US\$ 16 Djuta Ditandatangani.* 5 November 1960, hlm. 4
 Antara. *Pusat Koperasi Konsumsi Kebajoran Baru Salurkan 28.500 M Tekstil Dan 250 Kodi Batik Sandang.* 18 Desember 1962, hlm.4
 Antara. *Sumbangan AS Dalam Rentjana.....* 24 Desember 1960, hlm. 4 dan 5
 Antara. *Tekstil dan tepung Terigu Untuk Lebaran dan tahun Baru 1963.* 19 Desember 1962, hlm. 3
 Antara. *Timbang Terima Pelabuhan Tjilatjap.* 21 Desember 1962, hlm. 3
 Bintang Timur. *Indonesia Beli 50.000 Ton Minjak Kedele Dari AS, Pembayaran akan dilakukan Dalam Mata Uang Rupiah.* 22 Juni 1963, hlm. 2
 Duta Masyarakat. *150.000 Ton Beras Siap Untuk Diangkut Ke Indonesia.* 20 Nopember 1961, hlm. 1
 Duta Masyarakat. *Bantuan AS Kepada Indonesia.* 15 Agustus 1961, hlm. 3
 Duta Masyarakat. *Barang-Barang Surplus AS Untuk Indonesia.* 7 November 1961, hlm. 2
 Warta Berita. *Pengaturan Pengapalan Muatan Impor Indonesia oleh Bipalindo.* 19 Desember 1965, hlm.8

E. Majalah

Star Weekly, *Tinjauan Ekonomi. Program Sandang Pangan Dan Gambaran Keadaan.* 28 November 1959, hlm 6
 Star Weekly, *Tinjauan Luar Negeri. Kundjungan Muhibah Eisenhower Ke Asia.* 12 Desember 1959, hlm. 1

F. Buku

Booth, Anne dan Peter McCawley. 1986. *Ekonomi Orde Baru.* Jakarta: LP3ES
 Conte, C. dan Karr, A.1981. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat.* Amerika Serikat : Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Kantor Program Informasi Internasional
 Gardner, Paul F. 1999. *50 Tahun Amerika Serikat Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

- Hug, Kathleen E.. *Garis Besar Ekonomi Amerika Serikat*. Departemen Luar Negeri AS Kantor Program Informasi Internasional
- Irsan, Abdul. 2010. *Peluang dan tantangan diplomasi Indonesia*. Jakarta: Himmah Media Utama
- Jones, Walter S. 1993. *Logika Hubungan Internasional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal: 259
- Kasdi, Aminuddin, 2005. *Memahami Sejarah* . Surabaya : Unesa University Press
- Leirissa, R.Z. dkk. 2012. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- McCan, Robert L. *Garis Besar Ekonomi Amerika*. Dinas Penerangan Amerika Serikat
- Minderop, Albertine. 2006. *Pragmatisme Sikap Hidup dan Prinsip Politik Luar Negeri Amerika*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Mubyarto. 1995. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta : LP3ES
- Panitia Penulisan Buku Sejarah Diplomasi Indonesia. 2005. *Sejarah Diplomasi Republik Indonesia dari Masa ke Masa Periode 1960-1965*. Jakarta: Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notokusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ranoh, Ayub . 2006. *Kepemimpinan Kharismatis: tinjauan teologis – etis atas kepemimpinan Soekarno*. Jakarta : Gunung Mulia
- Ricklefs, M.C. 2010. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta
- Schuman, Gary. 1990. *Hubungan Indonesia – Amerika Serikat: Sebuah Laporan*. Jakarta: CSIS
- Setyowati, Rr.Nanik dan Maya Mustika K. 2011. *Hubungan Internasional*. Surabaya : Unesa University Press
- Singer, Peter. 2012. *Satu Bumi: Etika bagi Era Globalisasi*. Cianjur : IMR Press
- Soesastro, Hadi. 2005. *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir 2*. Yogyakarta: Kanisius
- Susilo, Taufiq Adi. 2009. *Mengenal Amerika Serikat*. Yogyakarta: Garasi
- Zanden, Luiten Van dan Daan Marks. 2012. *Ekonomi Indonesia 1800-2010 Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas
- Deputy Assistant (Persons) to the Chairman of the Subcommittee on Foreign Trade Policy (Boggs) . Washington Office of The Historian, Bureau of Public Affairs. 1966. *Milestones 1961-1968; USAID and PL-480, 1961-1969*. Washington
- Unit Khusus Museum Bank Indonesia: *Sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia: Moneter Periode 1959-1966*

H. Internet

Awanda Mahendra. *Dampak Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat Terhadap Stabilitas Keamanan di Indonesia*. Dalam https://www.academia.edu/3407071/Dampak_Hubungan_Indonesia_Dan_Amerika_Serikat_at_terhadap_Stabilitas_Keamanan_di_Indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 30 Januari 2015

_____. Pidato Kawan Sakirman. Dalam <https://www.marxists.org/indonesia/indones/KongresPKIke6/PidatoSakirman.htm>. Diakses tanggal 7 Agustus 2015

G. Jurnal

- Hasnan Habib. *50 Tahun Hubungan Diplomasi Indonesia-Amerika Serikat: Tinjauan Politik Keamanan atau militer*. Jurnal Studi Amerika, Vol. V, Agustus-Desember 1999
- Office of The Historian, Bureau of Public Affairs. 1957. *Foreign Relations of the United States, 1955–1957, Foreign Economic Policy; Foreign Information Program, Volume IX . Document 13. Letter From the President's*